

LAPORAN KINERJA

SEKRETARITAT DITJEN PERIKANAN TANGKAP

TAHUN 2021



DITJEN PERIKANAN TANGKAP

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

2021

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi kepada publik. Sebagai salah satu Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan, berupaya memenuhi ketentuan PerPres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejak tahun 2013 dan sejalan dengan proses reformasi birokrasi, pengelolaan kinerja di KKP telah bertransformasi melalui metode penerapan Balanced Scorecard (BSC). Dengan BSC, seluruh unit-unit organisasi kini memiliki kaitan yang erat baik secara vertikal maupun horizontal yang bermuara kepada satu titik pencapaian visi dan misi KKP. BSC menjadi instrumen yang tepat bagi sebuah organisasi dan individu-individu yang ada di dalamnya untuk bisa melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja.

Implikasi dari semua proses ini tentunya memang membutuhkan beberapa perubahan paradigma dalam penyusunan dan pengukuran kinerja. Proses transisi memang tidak mudah, tapi Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap akan terus konsisten dalam mendukung upaya KKP berada dalam jalur Reformasi Birokrasi.

Semoga apa yang disajikan dalam LKJ Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2021 ini dapat menjadi masukan kepada seluruh pihak terkait dalam memahami proses pelaksanaan tugas di Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Jakarta, 14 Januari 2022

Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap,



Trian Yunanda

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap pada tahun 2021 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 154.966.328.000 dalam perjalanannya pagu Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap terjadi perubahan sepanjang tahun 2021 yang merupakan revisi pemotongan penambahan anggaran stimulis Covid-19. Sehingga pagu akhir Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap TA 2021 sebesar Rp. Rp. 128.868.554.000. Realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2021 ini terealisasi sebesar Rp. 128.648.401.347 atau mencapai 99,83%. Secara kinerja, Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap mendapatkan total Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 106,96%.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap pada tahun 2021, terdapat 2 Sasaran Kegiatan dengan 14 Indikator Kinerja (IK) yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2021. Tercapaiannya keseluruhan Indikator Kinerja tersebut mengakibatkan nilai NPSS telah mencapai target. Adapun rincian pencapaian IK adalah sebagai berikut:

1. Tingkat validitas data produksi perikanan tangkap (persen) (108,93%);
2. Nilai PMPRB Ditjen Perikanan Tangkap (nilai) (100,26%);
3. Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (indeks) (103,79%);
4. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020 (persen) (100%);
5. Nilai PM SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai) (101,50%);
6. Nilai rekonsiliasi kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai) (11,50%);
7. Persentase pemenuhan dokumen maturitas SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (persen) (100%);
8. Persentase unit kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen) (116,15%);
9. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen) (133,52%);
10. Jumlah inovasi pelayanan publik (inovasi) (100%);
11. Tingkat kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen) (113,31%);
12. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen) (137,93%);
13. Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap (nilai) (102,12%); dan
14. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai) (102,30%).

Guna meningkatkan kinerja selanjutnya, seluruh penanggung jawab IK dan Tim Pengelola Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap agar melakukan evaluasi pencapaian yang telah dicapai serta melakukan pemantauan dan pengawalan untuk pencapaian kinerja periode berikutnya sampai dengan akhir tahun. Komitmen dan tanggung jawab secara bersama seluruh pimpinan dan pegawai lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap diharapkan dapat mendukung kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang lebih baik lagi pada periode berikutnya.

DAFTAR ISI

URAIAN	HALAMAN
KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR GAMBAR	6
DAFTAR TABEL	7
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Maksud dan Tujuan	9
1.3 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	9
1.4 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 Rencana Strategis Tahun 2020-2024	12
2.2 Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja	13
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	13
2.4 Rencana Aksi Penetapan Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1 Capaian Kinerja Sekretariat	18
3.2 Analisis Capaian Kinerja	19
3.2.1 Sasaran Kegiatan: Sumber daya ikan berkelanjutan	19
Tingkat validitas data produksi perikanan tangkap	19
3.2.2 Sasaran Kegiatan: Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	20
A Nilai PMPRB Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	20
B Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	22
C Persentase penyelesaian temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020 (persen)	24
D Nilai PM SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	25
E Nilai Rekonsiliasi Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	26
F Persentase pemenuhan dokumen maturitas SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	27
G Persentase Unit Kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (persen)	32
H Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Sekretariat DJPT yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (persen)	33
I Jumlah inovasi pelayanan publik (inovasi)	34

J	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	35
K	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	37
L	Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	39
M	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	40
3.3	Kinerja Anggaran	41
BAB IV PENUTUP		42
LAMPIRAN		43

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	URAIAN	HALAMAN
1	Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2021	10
2	Dashboard Aplikasi Kinerja Sekretariat DJPT Triwulan 4 Tahun 2021	18
3	Hasil Pengukuran IP ASN Sekretariat DJPT per Komponen Tahun 2021	23
4	Grafik Perbandingan Capaian IP ASN antar Eselon II lingkup DJPT Tahun 2021	23
5	Grafik Perbandingan Capaian Nilai Rekonsiliasi antar Eselon II lingkup DJPT Tahun 2021	27
6	Capaian Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar lingkup Eselon II DJPT per Komponen Tahun 2021	32
7	Perbandingan capaian Indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Eselon I KKP Tahun 2021	37
8	Perbandingan capaian Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Eselon I KKP Tahun 2021	38
9	Perbandingan capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) antar Eselon I lingkup KKP Tahun 2021	40

DAFTAR TABEL

Tabel	URAIAN	HALAMAN
1	Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021	16
2	Capaian Indikator Kinerja Sekretariat DJPT Tahun 2021	18
3	Capaian IK "Tingkat Validitas Data Produksi Perikanan Tangkap" Tahun 2021	19
4	Persentase Validitas Data Produksi Perikanan Tangkap per sepsis, API dan WPP	20
5	Capaian IK "Nilai PMPRB Ditjen Perikanan Tangkap" Tahun 2021	21
6	Hasil PMPRB Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2021	21
7	Capaian IK "Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap" Tahun 2021	22
8	Capaian IK "Persentase penyelesaian temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen Perikanan Tangkap" Tahun 2021	24
9	Capaian IK "Nilai PM SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap" Tahun 2021	25
10	Komponen Penilaian Implementasi SAKIP	25
11	Capaian IK "Nilai Rekonsiliasi Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap" Tahun 2021	26
12	Komponen Penilaian Rekonsiliasi Kinerja	27
13	Capaian IK "Persentase Pemenuhan Dokumen Maturitas SPIP Ditjen Perikanan Tangkap" Tahun 2021	27
14	Capaian IK "Persentase Unit Kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar" Tahun 2021	32
15	Capaian IK "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Sekretariat DJPT yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan" Tahun 2021	33
16	Capaian IK "Jumlah Inovasi Pelayanan Publik" Tahun 2021	34
17	Capaian IK "Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap" Tahun 2021	36
18	Capaian IK "Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap" Tahun 2021	38
19	Capaian IK "Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap" Tahun 2021	39
20	Capaian IK "Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap" Tahun 2021	41
21	Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja	41

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Presiden telah menyatakan bahwa Laut adalah Masa Depan Peradaban Bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa laut tidak boleh dipungguni, sudah saatnya bangsa Indonesia melihat laut sebagai sumber kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Memperhatikan amanat Trisakti dan Nawa Cita, serta untuk mendukung terwujudnya Redistribusi Keadilan dengan target Gini Ratio 0,3 melalui sektor unggulan nasional “Kemaritiman dan Kelautan” dan “Kedulatan Pangan”, maka paradigma pembangunan kelautan dan perikanan, adalah pertumbuhan, pemerataan, dan modernisasi. Pertumbuhan yang dimaksud adalah bagaimana upaya KKP untuk dapat meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pemerataan pembangunan akan dilakukan dengan memberikan peluang bagi usaha skala kecil untuk maju dan mandiri dengan tetap memelihara keberlanjutan usaha skala besar. Modernisasi dimaksudkan agar seluruh usaha yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah yang optimal di dalam negeri.

Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan daya dukung lingkungan, sehingga dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan dan lestari. Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, diamanatkan bahwa salah satu instrumen pengelolaan sumber daya perikanan adalah melalui perizinan usaha penangkapan ikan. Perizinan usaha penangkapan ikan merupakan upaya pengendalian (control) untuk memelihara keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumberdaya ikan. Selain itu, pelayanan usaha penangkapan ikan melalui perizinan juga berfungsi untuk membina usaha penangkapan ikan dalam rangka kepastian usaha penangkapan ikan.

Selain perubahan terhadap fokus kenelayanan dan pengendalian penangkapan ikan, juga terdapat perubahan terkait dengan alokasi anggaran dimana pada periode pemerintahan sebelumnya, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengalokasikan sebagian besar anggarannya pada pembangunan pelabuhan perikanan, namun pada periode pemerintahan saat ini difokuskan kepada pengadaan kapal perikanan. Hal ini bertujuan untuk memprioritaskan pembangunan perikanan tangkap kepada nelayan sehingga nelayan secara langsung dapat memperoleh manfaat

dari kegiatan pembangunan perikanan tangkap. Di sisi lain, fokus pelabuhan perikanan adalah pada upaya pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan pelabuhan perikanan yang telah ada agar dapat difungsikan secara optimal. Keseluruhan pembangunan ini akan dilaksanakan secara efektif dan efisien pada tahun 2021 dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 yang dan tetap dengan menjunjung aspek akuntabilitas dan transparansi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah melaksanakan berbagai kegiatan guna memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Terdapat 14 Indikator Kinerja Utama yang merepresentasikan keberhasilan pencapaian dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Untuk mencapai indikator-indikator tersebut, Sekretariat Ditjen Perikanan membagi dalam 4 bagian pelaksanaan kinerja dilaksanakan oleh 4 Unit Bagian yaitu Bagian Program, Bagian Keuangan dan Umum, Bagian Hukum, Organisasi dan Kerjasama serta Bagian SDM Aparatur.

Untuk memastikan keseluruhan program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana target waktu, kuantitas, kualitas dan sarannya, maka capaian kinerja tersebut dilaporkan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Permen PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, bahwa setiap Kementerian/Lembaga (K/L) diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, dan menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) pada setiap akhir tahun kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) tahun 2021 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap. Adapun tujuan penyusunan LKj ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Sekretariat DJPT selama tahun 2021. Selain itu digunakan juga untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dilaksanakan dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap untuk meningkatkan kinerjanya. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan atau rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan pembangunan perikanan tangkap ke depan.

1.3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

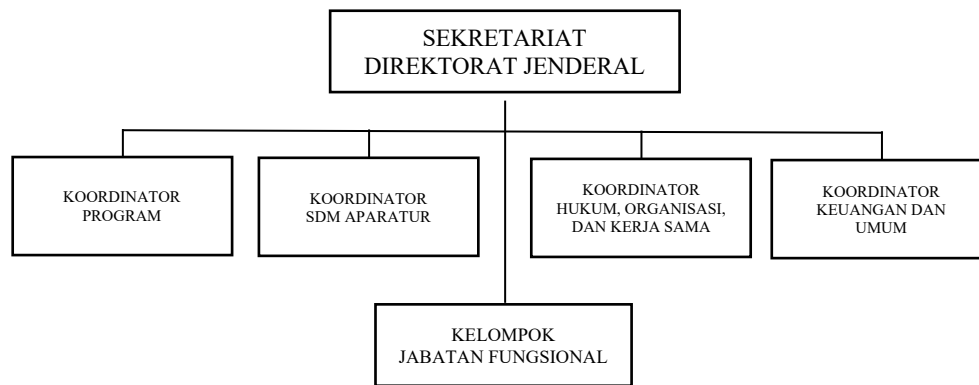
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan direktorat jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan data dan kinerja, penyiapan bahan pimpinan, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
2. koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia aparatur, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
3. koordinasi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
4. koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan
5. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, barang milik negara, dan ketatausahaan.

Adapun susunan organisasi Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap terdiri atas:

1. Koordinator Program;
2. Koordinator SDM Aparatur;
3. Koordinator Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama;
4. Koordinator Keuangan dan Umum; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap tergambar pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2021

1.4. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada triwulan mendatang.

2. Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang Laporan Kinerja yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama waktu tertentu (waktu pelaporan).

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK) pada periode triwulan yang tertentu.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

5. Bab IV Penutup

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis serta strategi pemecahan masalah.

6. Lampiran

Isi dari pada lampiran merupakan kumpulan dari Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja yang telah di tandatangi oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan Menteri Kelautan dan Perikanan serta Penetapan Kinerja antara Direktur Jenderal dengan para Direktur lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia 2045 untuk “Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Pencapaian visi tersebut dilakukan melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi. Pidato Presiden pada saat pelantikan tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan fokus-fokus pembangunan dalam lima tahun ke depan meliputi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.

Ditjen Perikanan Tangkap memiliki peran strategis untuk mendukung fokus program utama presiden tersebut di bidang perikanan tangkap yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan dengan berbagai upaya akselerasi pencapaian. Diharapkan pembangunan perikanan tangkap pada gilirannya mampu meningkatkan kontribusinya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan sumberdaya ikan yang berkelanjutan. Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi pembangunan perikanan tangkap ditetapkan sebagai berikut: “Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”. Visi tersebut merupakan prinsip utama yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam misi, strategi dan upaya-upaya pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan.

Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, melalui Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap;
2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Tangkap;
3. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan, melalui Peningkatan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Tangkap;
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup DJPT.

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka tujuan pembangunan pembangunan perikanan tangkap adalah :

1. Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap, yaitu meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM perikanan tangkap, termasuk memberdayakan nelayan;
2. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Tangkap, yaitu:
 - a. Optimalisasi integrasi infrastruktur dan operasionalisasi pelabuhan perikanan;
 - b. Mengembangkan armada perikanan tangkap yang kompetitif dan produktif;
 - c. Reformasi tata kelola perizinan usaha perikanan tangkap.
3. Peningkatan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Tangkap, yaitu optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP);
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup DJPT, yaitu meningkatnya kinerja reformasi birokrasi DJPT secara berkualitas

2.2. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan indikator kinerja dan target kinerja yang dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja (PK). Untuk menunjang pencapaian kegiatan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap, terdapat 2 sasaran kegiatan dan 14 Indikator Kinerja. Sasaran kegiatan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan tujuan yang akan dicapai dengan masing-masing Indikator Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sasaran kegiatan pertama yang akan dicapai adalah **“Sumber Daya Ikan Berkelanjutan”** dengan indikator kinerja: Tingkat validitas data produksi perikanan tangkap;
2. Sasaran kegiatan kedua yang akan dicapai adalah **“Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap”** dengan indikator kinerja:
 - a. Nilai PMPRB Ditjen Perikanan Tangkap;
 - b. Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap;
 - c. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020;
 - d. Nilai PM SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap;
 - e. Nilai rekonsiliasi Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap;
 - f. Persentase pemenuhan dokumen maturitas SPIP Ditjen Perikanan Tangkap;
 - g. Persentase unit kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar;
 - h. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Sekretariat DJPT dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan;
 - i. Jumlah inovasi pelayanan publik;
 - j. Tingkat kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap;
 - k. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap;
 - l. Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap; dan
 - m. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap.

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/ kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Penetapan Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2021, secara rinci sebagai berikut:



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON (021) 3519070 (EXT:1239), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM: <https://kkp.go.id/djpt>, SURAT ELEKTRONIK: djpt@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Trian Yunanda**

Jabatan : Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Muhammad Zaini**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 September 2021

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Muhammad Zaini

Pihak Pertama
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal
Perikanan Tangkap

Trian Yunanda

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP


NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Sumber Daya Ikan Berkelanjutan	1	Tingkat validitas data produksi perikanan tangkap (persen)	85
2.	Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	2	Nilai PMPRB Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	31
		3	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	73
		4	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020 (persen)	100
		5	Nilai PM SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	85,15
		6	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	85,15
		7	Persentase pemenuhan dokumen maturitas SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	100
		8	Persentase unit kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	84
		9	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Sekretariat DJPT yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (persen)	65
		10	Jumlah inovasi pelayanan publik (inovasi)	1
		11	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	72,5
		12	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	72,5
		13	Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	89
		14	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	86

Kegiatan : Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

Jumlah Anggaran Tahun 2021 : Rp. 128.868.554.000,-

Jakarta, 1 September 2021

Pihak Kedua
 Direktur Jenderal Perikanan Tangkap


Muhammad Zaini

Pihak Pertama
 Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap


Trian Yunanda

2.4. Rencana Aksi Penetapan Kinerja

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen penetapan kinerja. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulanan) terhadap pencapaian indikator output dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dilakukan upaya – upaya tindak lanjut guna mengeliminir permasalahan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi disusun hanya untuk menjabarkan IKU sebagaimana pada Tabel berikut ini.

Tabel 1. Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021

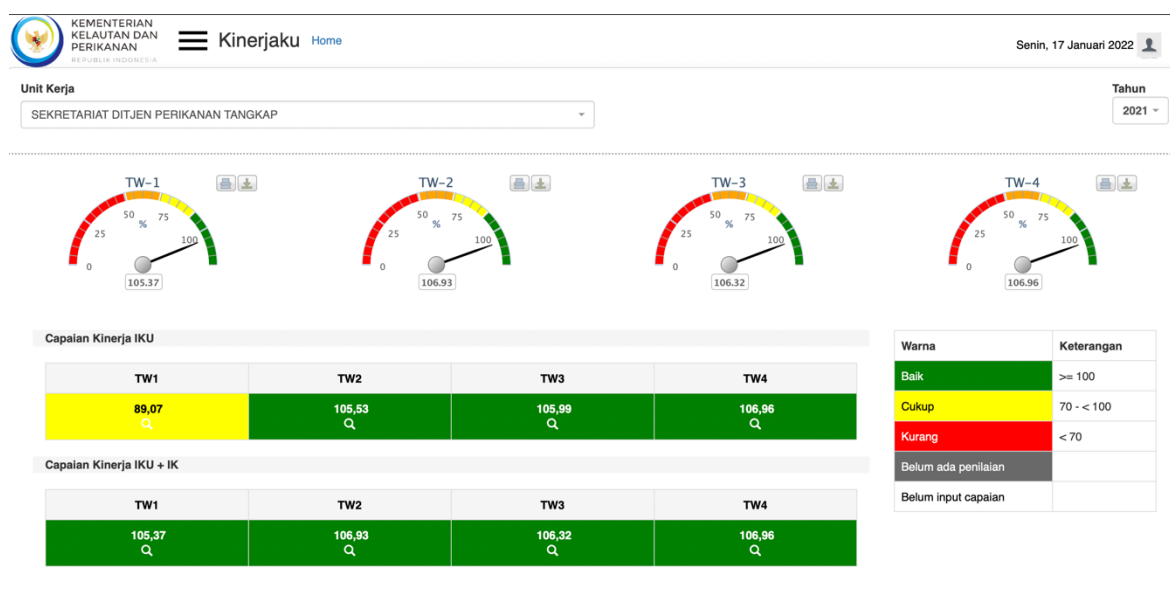
No.	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI
1	Tingkat validitas data produksi perikanan tangkap (persen)	Pertemuan validasi data statistik perikanan tangkap Semester I dan Sosialisasi Pendataan Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2021
		Pertemuan validasi data statistik perikanan tangkap Semester II dan validasi Data Pelabuhan Perikanan
2	Nilai PMPRB Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	Layanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
3	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	Layanan Perencanaan, Pengembangan, dan Disiplin Pegawai
		Layanan Pengangkatan, Kepangkatan, Pemberhentian, Pensiun, dan Mutasi)
		Layanan Pengembangan, Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional
4	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020 (persen)	Penyelesaian dan evaluasi tindak lanjut laporan hasil audit lingkup DJPT
		Analisis vertikal dan horisontal laporan keuangan lingkup DJPT
		Penyelesaian dan evaluasi tindak lanjut laporan hasil audit lingkup
		Pendampingan pemeriksaan dan tindak lanjut temuan Satker lingkup DJPT
5	Nilai PMSAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	Finalisasi Laporan Kinerja Tahun 2020 Ditjen Perikanan Tangkap beserta data dukungannya
		Penyusunan matriks rencana aksi pencapaian kinerja Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2021
		Penyusunan pedoman pengukuran Indikator Kinerja Utama Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2021
		Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I, II, III Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2021
		Pemantauan dan evaluasi kinerja melalui aplikasi kinerjaku
		Supervisi Penilaian Mandiri SAKIP Tahun 2021 lingkup DJPT bersama Menpan RB
6	Nilai Rekonsiliasi Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	Rekonsiliasi dan penyusunan pelaporan keuangan semester II TA. 2020 dan semester I TA. 2021 lingkup DJPT
		Rekonsiliasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan terpusat
7	Persentase pemenuhan dokumen maturitas SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Lingkup DJPT
8	Persentase unit kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan	Monitoring dan evaluasi unit kerja Sekretariat yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar

No.	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI
	sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	
9	Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Sekretariat DJPT yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (persen)	Monitoring dan evaluasi rekomendasi hasil pengawasan lingkup Sekretariat DJPT yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan
10	Jumlah inovasi pelayanan publik (inovasi)	Updating perizinan SILAT, SIMKADA LKU/LKP
11	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	Monitoring dan evaluasi Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
12	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	Monitoring dan evaluasi Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
13	Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	Monitoring dan evaluasi Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangka
14	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	Monitoirng dan evaluasi Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap pada tahun 2021 sebagaimana yang dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) menitikberatkan pada 2 sasaran kegiatan dan 14 Indikator Kinerja. Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja pada Sekretariat menggunakan aplikasi www.kinerjaku.kkp.go.id. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon II. Berdasarkan perjanjian kinerja di atas, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala dengan tampilan dashboard capaian Sekretariat tahun 2021 seperti pada gambar berikut:



Gambar 2. Dashboard Aplikasi Kinerjaku Sekretariat DJPT Triwulan 4 Tahun 2021

Capaian kinerja Sekretariat pada tahun 2021 sudah baik, hal ini ditandai dengan nilai Capaian Kinerja IKU sebesar 106,96% serta nilai Capaian Kinerja IKU dan IK sebesar 106,96%. Capaian kinerja Sekretariat DJPT triwulan IV tahun 2021 adalah baik yang mana terlihat dari seluruh indikator yang telah tercapai maksimal dan masuk dalam katagor “baik” (≥ 100). Adapun rekapitulasi capaian indikator kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap pada tahun 2021 seperti pada tabel berikut:

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Sekretariat DJPT Tahun 2021

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PK 2021	TRIWULAN 4				
			TARGET	REALISASI	%CAPAIAN		
1	Sumber daya ikan berkelanjutan	1	Tingkat validitas data produksi perikanan tangkap (persen)	85	85	92,59	108,93
2	Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	2	Nilai PMPRB Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	31	31	31,08	100,26
		3	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	73	73	75,77	103,79
		4	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020 (persen)	100	100	100,00	100,00
		5	Nilai PM SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	85,15	85,15	86,43	101,50

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET PK 2021	TRIWULAN 4		
				TARGET	REALISASI	%CAPAIAN
	6	Nilai rekonsiliasi Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	85,15	85,15	94,94	111,50
	7	Persentase pemenuhan dokumen maturitas SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	100	100	100	100,00
	8	Persentase unit kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	84	84	97,57	116,15
	9	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Sekretariat DJPT yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (persen)	65	65	86,79	133,52
	10	Jumlah inovasi pelayanan publik (inovasi)	1	1	1	100,00
	11	Tingkat kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	72,5	72,5	82,15	113,31
	12	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	72,5	72,5	100	137,93
	13	Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	89	89	90,89	102,12
	14	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	86	86	87,98	102,30

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja untuk setiap perspektif sebagai berikut:

3.2.1. Sasaran Kegiatan: Sumber Daya Ikan Berkelanjutan

Tingkat Validitas Data Produksi Perikanan Tangkap

Validitas produksi perikanan adalah tingkat hubungan antar variabel data dalam kegiatan produksi. Validitas ini mencakup, produksi berdasarkan jenis ikan, alat tangkap serta area penangkapan (WPPNRI).

Tabel 3. Capaian IK "Tingkat Validitas Data Produksi Perikanan Tangkap" Tahun 2021

SK 1		Sumber Daya Ikan Berkelanjutan						
IK 1		Tingkat Validitas Data Produksi Perikanan Tangkap						
2020		2021				% Capaian		% Pertumbuhan
Realisasi		Target		Realisasi				
TW 1	Tahunan	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	
-			-	-	-	-	-	-
TW 2			TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2	
-		85,00	96,30	96,30	113,29	113,29	-	
TW 3			TW 3	TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3	
-		85,00	96,30	96,30	113,29	113,29	-	
TW 4			TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4	
-		85,00	92,59	92,59	108,93	108,93	-	

Kegiatan yang mendukung IKU ini adalah Pertemuan Validasi Data Statistik Perikanan Tangkap Nasional untuk 1 tahun kegiatan. Kegiatan ini merupakan pertemuan antara provinsi,

pelabuhan dan pusat yang membahas permasalahan teknis statistik perikanan tangkap dan upaya pemantapan hasil yang dicapai maupun persamaan persepsi antara pusat dan daerah. Hasil pertemuan menunjukkan bahwa walaupun sudah dapat disajikan statistik perikanan tahunan pada tingkat daerah maupun secara nasional, masih terdapat permasalahan teknis maupun permasalahan operasional di lapangan, sehingga pada akhirnya akan mengakibatkan menurunnya tingkat akurasi dan keterlambatan pada penyajian statistik tahunan.

Tabel 4. Persentase Validitas Data Produksi Perikanan Tangkap per sepsis, API dan WPP

		bobot
Produksi per Spesies/Pelagis Besar	0,259259	0,33
Produksi per API	0,33	0,33
Produksi per WPP	0,33	0,33
	92,59%	

Pada pemeriksaan umum, data yang dicek terutama untuk ikan Tuna Sirip Biru dan Albakora, terlihat bahwa kedua spesies ini ditangkap pada semua WPP. Padahal sejatinya, kedua spesies ini umum terdapat di WPP 573 saja. Bobot penilaian pada ketiga indikator, yaitu total volume pada WPPNRI per alat tangkap, total volume per WPPNRI secara keseluruhan masih sesuai. sedangkan untuk kategori sumber daya ikan, terdapat 2 spesies yang masih perlu perbaikan dalam penginputan dan menjadi bahan validasi secara keseluruhan bagi validator. dari 9 sumber daya ikan yang diukur, saat ini yang paling terlihat jelas adalah kedua spesies tersebut dari Sumber Daya pelagis Besar.

3.2.2. Sasaran Kegiatan: Tata kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap

A. Nilai PMPRB Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Ditjen Perikanan Tangkap sebagaimana yang telah diatur oleh Kemenpan dan telah diverifikasi oleh Inspektorat Jenderal KKP. Komponen penilaian terdiri atas 8 area perubahan yakni sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan, dengan indikator penilaian: Tim RB, Roadmap RB, Pemantauan dan Evaluasi RB, Perubahan Pola Pikir dan budaya kinerja;
2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan, dengan indikator penilaian: Harmonisasi dan Sistem Pengendalian dalam penyusunan perundang-undangan;
3. Penataan dan Penguatan Organisasi, dengan indikator penilaian: Evaluasi dan Penataan;
4. Penataan Tata Laksana, dengan indikator penilaian: Proses bisnis dan SOP kegiatan utama, E-Government, Keterbukaan Informasi Publik;
5. Penataan Sistem Manajemen Sumberdaya Manusia, dengan indikator penilaian: Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN, Pengembangan pegawai berbasis kompetensi, Promosi jabatan dilakukan secara terbuka, Penetapan kinerja individu, penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai, Pelaksanaan evaluasi jabatan, Sistem informasi Kepegawaian;
6. Penguatan Akuntabilitas, dengan indikator penilaian: Keterlibatan pimpinan, Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja;
7. Penguatan Pengawasan, dengan indikator penilaian: Gratifikasi, Penerapan SPIP, Pengaduan masyarakat, Whistle Blowing System, Penanganan Benturan Kepentingan dan Pembangunan Zona Integritas, APIP; dan

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator penilaian: Standar pelayanan, Budaya pelayanan prima, Pengelolaan pengaduan dan Penilaian kepuasan terhadap pelayanan Pemanfaatan teknologi Informasi.

Tabel 5. Capaian IK "Nilai PMPRB Ditjen Perikanan Tangkap" Tahun 2021

SK 2		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap								
IK 2		Nilai PMPRB Ditjen Perikanan Tangkap								
2020		2021				% Capaian		% Pertumbuhan	Renstra DJPT	
Realisasi		Target		Realisasi						
TW 1	Tahunan	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2024	% TW 1 2021	
-			-	-	-	-	-		-	
TW 2	32,32	31,00	TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2	34	% TW 1 2021	
32,32			31,00	31,08	100,26	100,26	-3.84		91,41	
TW 3			TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2		% TW 1 2021	
32,32			31,00	31,08	100,26	100,26	-3.84		-	
TW 4			TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2		% TW 1 2021	
32,32			31,00	31,08	100,26	100,26	-3.84		-	

Penilaian Kinerja Reformasi Birokrasi lingkup DJPT merupakan nilai yang diperoleh dari proses Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara internal dengan Inspektorat Jenderal selaku evaluator. Penilaian ini dilakukan terhadap pelaksanaan delapan area perubahan Reformasi Birokrasi. Target indikator nilai kinerja reformasi birokrasi DJPT pada 2021 adalah 31 (kategori A/Memuaskan). Sesuai dengan hasil reuiu terhadap kertas kerja Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Ditjen Perikanan Tangkap, maka diperoleh kesepakatan nilai PMPRB DJPT sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil PMPRB Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2021

No	Area	Pemenuhan		Reform	
		Bobot	Nilai Hasil Pembahasan	Bobot	Nilai Hasil Pembahasan
1	Manajemen Perubahan	2,00	1,65	3,00	2,16
2	Deregulasi Kebijakan	1,00	1,00	2,00	2,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	2,00	1,50	1,50
4	Penataan Tatalaksana	1,00	0,86	3,75	2,77
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,37	2,00	1,75
6	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,31	3,75	3,00
7	Penguatan Pengawasan	2,20	1,90	1,95	1,95
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,00	3,75	2,86
Nilai		14,60	13,09	21,70	17,99
Nilai PMPRB (pemenuhan + reform)		31,08			

Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2021 merupakan indikator kinerja yang bersifat tahunan, akan tetapi capaiannya telah dihitung dan hasilnya telah dikeluarkan secara resmi oleh Tim Itjen KKP per tanggal 26 April 2021 dengan angka capaian sebesar 31,08. Capaian ini setara dengan 100,26% terhadap target tahun 2021 yakni 31 atau 91,41% terhadap target jangka menengah tahun 2024 yakni 34. Jika dibandingkan capaian pada tahun 2020 yakni 32,32 maka capaian pada tahun 2021 menurun sebesar 3,84%.

Beberapa permasalahan umum yang sering terjadi lain dalam pencapaian indikator ini berdasarkan antara lain: 1) pelaksanaan program dan kegiatan belum sepenuhnya didasarkan atas

prosedur yang baku dan terstandarisasi; 2) Kualitas pelayanan publik masih belum memenuhi harapan masyarakat; 3) Sistem pengawasan internal belum mampu berperan sebagai quality assurance; 4) Sistem monitoring, evaluasi, dan penilaian belum optimal; dan 5) Praktik manajemen SDM belum optimal meningkatkan profesionalisme.

Oleh karena itu, beberapa langkah dan strategi yang perlu dilakukan di DJPT adalah:

1. Komitmen bersama, diawali dengan adanya komitmen pimpinan beserta seluruh jajaran, baik pusat maupun UPT.
2. Adanya semangat perubahan, terutama menyangkut pola pikir dan budaya kerja.
3. Konsistensi, bahwa RB sejatinya adalah perubahan yang terus menerus (continuous improvement) atau dalam operasional dikenal dengan metode Plan, Do, Check, Act (PDCA).
4. Ketersediaan anggaran yang memadai guna mendukung pelaksanaan program reformasi birokrasi.
5. Adanya kerja sama di semua lini organisasi, sehingga ada rasa memiliki RB pada unit kerja kita.

B. Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)

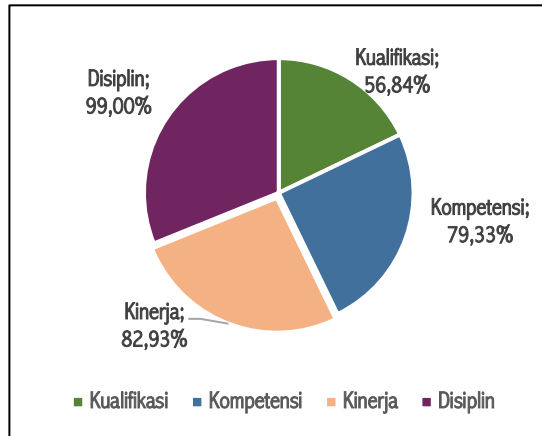
Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis ini adalah Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Sekretariat DJPT. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Indeks Profesionalitas ASN meliputi dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Penilaian dimensi kualifikasi menggambarkan informasi kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Sedangkan dimensi kompetensi merupakan informasi yang menggambarkan riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, mulai dari diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis maupun seminar/workshop/magang/kursus. Dimensi kinerja menilai kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang berupa Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP). Informasi ke pegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS ditunjukkan melalui dimensi disiplin. Pengolahan data diambil dari database kepegawaian SIMPEG Online KKP.

Tabel 7. Capaian IK “Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap” Tahun 2021

SK 2		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap							
IK 3		Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap							
2020		2021			% Capaian		% Pertumbuhan	Renstra DJPT	
Realisasi		Target		Realisasi					
TW 1	Tahunan	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2024	% TW 1 2021
-	72,00	73,00	-	-	-	-	-	76	-
TW 2			TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2		% TW 2 2021
-			65,00	56,40	86,77	77,26	-		81,89
TW 3			TW 3	TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3		% TW 3 2021
-			65,00	56,40	86,77	77,26	-		-

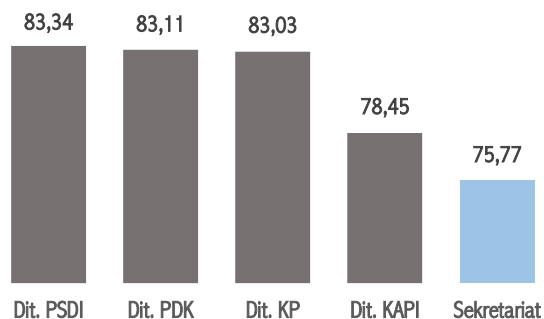
SK 2		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap							
IK 3		Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap							
2020		2021			% Capaian		% Pertumbuhan	Renstra DJPT	
Realisasi		Target	Realisasi						
TW 4			TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4		% TW 4 2021
72,00			73,00	75,77	103,79	103,79	5,24		104,86



Gambar 3. Hasil Pengukuran IP ASN Sekretariat DJPT per Komponen Tahun 2021

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN lingkup Sekretariat DJPT tahun 2021 adalah sebesar 77,77 dengan capaian nilai per dimensi yaitu (1) Dimensi Kualifikasi sebesar 14,21 atau sebesar 56,84% dari bobot 25, (2) Dimensi Kompetensi sebesar 31,73 atau sebesar 79,33% dari bobot 40, (3) dimensi kinerja (bobot 30) sebesar 24,88 atau sebesar 82,93% dari bobot 30 dan (4) Dimensi disiplin sebesar 4,95 atau sebesar 99% dari bobot 5. Berbeda dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, capaian tahun 2021 telah melebihi target sebesar 103,79% dan mengalami kenaikan sebesar 6,1%

dari tahun sebelumnya. Hal ini didukung oleh beberapa hal yakni meningkatnya kepedulian dan minat pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan/seminar/workshop, diselenggarakannya pelatihan mandiri berupa inhouse training di masing-masing koordinator serta meningkatnya kemandirian pegawai dalam mengunduh dokumen kepegawaian pada aplikasi sistem kepegawaian.



Gambar 4. Grafik Perbandingan Capaian IP ASN antar Eselon II lingkup DJPT Tahun 2021

Berdasarkan gambar diatas, nilai capaian Sekretariat DJPT berada di peringkat 5 dengan capaian sebesar 75,77. Secara rinci pencapaian tertinggi berada pada Dit. PSDI sebesar 83,34 dan pencapaian terendah berada pada Sekretariat DJPT sebesar 75,77. Capaian IP ASN diukur secara tahunan dan adapun kegiatan yang diseleenggarakan oleh Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap untuk mencapai target tahunan ini antara lain:

1. Melakukan identifikasi dan pemetaan pegawai yang nilai IP ASN nya masih rendah dan di bawah target, termasuk bagi pegawai yang membutuhkan pelatihan dan tambahan keterampilan sesuai dengan deskripsi pekerjaan serta mengusulkan untuk pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi yang bersangkutan;
2. Guna peningkatan kualifikasi pegawai, dilakukan penyampaian informasi – informasi terkait peluang – peluang untuk melanjutkan Pendidikan serta jenis pelatihan yang dapat dilakukan

secara mandiri seperti Bimbingan Teknis, Workshop Teknis dan atau Inhouse Training serta peningkatan kapasitas lainnya; dan

3. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian IP ASN untuk setiap pegawai dan koordinasi dengan penanggung jawab capaian IP ASN.

Adapun kendala yang dihadapi untuk pencapaian IK ini yakni sebagai berikut :

1. Pegawai Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap sebanyak 20% memiliki Pendidikan maksimal SLTA dan sederajat yang kurang memiliki semangat dan minta untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
2. Rendahnya kepedulian pegawai untuk melakukan peremajaan data secara mandiri ke dalam aplikasi sistem kepegawaian;
3. Keterbatasan akses untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilakukan, khususnya terkait Diklat 20 Jam Pelajaran; dan
4. Keterbatasan kuota Diklat Kepemimpinan dari Unit Kerja Berwenang yang berdampak pada rendahnya nilai kompetensi bagi pejabat stuktural.

Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilakukan koordinasi dengan unit kerja terkait baik ke pengelola sumberdaya manusia aparatur di setiap unit kerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap maupun ke unit kerja eksternal Ditjen Perikanan Tangkap yang memiliki kewenangan untuk peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.

C. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen Perikanan Tangkap (persen)

Persentase penyelesaian temuan LHP BPK atas laporan keuangan Ditjen Perikanan Tangkap adalah persentase yang dihitung dari jumlah nilai temuan LK TA. 2020 pada LHP kepatuhan yang dibagi dengan realisasi riil tahun 2020 yang dikali dengan 100%. Penilaian ini terbatas pada evaluasi jumlah temuan yang terdapat pada Sekretariat, termasuk rekomendasi yang disampaikan oleh Itjen serta dan yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) sebagai pendukung untuk menyelesaikan temuan tersebut.

Tabel 8. Capaian IK “Persentase penyelesaian temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen Perikanan Tangkap” Tahun 2021

SK 2		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap								
IK 4		Persentase penyelesaian temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen Perikanan Tangkap								
2020		2021				% Capaian		% Pertumbuhan	Renstra DJPT	
Realisasi		Target		Realisasi						
TW 1	Tahunan	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2024	% TW 1 2021	
-	100	100	-	-	-	-	-	100	-	
TW 2			TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2		TW 2	
-			-	-	-	-	-		-	-
TW 3			TW 3	TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3		TW 3	
-			-	-	-	-	-		-	-
TW 4			TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4		TW 4	
100			100	100	100	100	0		100	

Perhitungan IK adalah secara tahunan, sehingga realisasinya didapatkan setelah hasil audit BPK selesai. Realisasi penyelesaian temuan LHP BPK atas laporan keuangan Ditjen Perikanan Tangkap yang didapatkan pada Triwulan IV sebesar 100%. Hal ini ditandai dengan telah dilakukannya tindak lanjut terhadap 2 temuan Ditjen Perikanan Tangkap, yaitu (1) penatausahaan PNBPN pada 17 satker di enam Eselon I tidak sesuai ketentuan dan tidak didukung dengan sistem pengendalian intern yang memadai dengan nilai sebesar Rp. 47.765.701; dan (2) pengelolaan belanja barang Non 526 belum sesuai ketentuan dengan nilai sebesar Rp. 48.850.000.

D. Nilai PM SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Sedangkan pada tingkat Eselon I KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Itjen KKP.

Tabel 9. Capaian IK “Nilai PM SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap” Tahun 2021

SK 2		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap								
IK 5		Nilai PM SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)								
2020		2021				% Capaian		% Pertumbuhan	Renstra DJPT	
Realisasi		Target		Realisasi						
TW 1	Tahunan	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2024	% TW 1 2021	
-	85,21	85,15	-	-	-	-	-	85,75	-	
TW 2			TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2		% TW 2 2021	
-			-	-	-	-	-		-	
TW 3			TW 3	TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3		% TW 3 2021	
85,21			85,15	86,43	101,50	101,50	1,43		100,79	
TW 4			TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4		% TW 4 2021	
85,21	85,15	86,43	101,50	101,50	1,43	-				

Penilaian terhadap implementasi SAKIP oleh Inspektorat II diperoleh nilai 86,43 dari nilai maksimum 100 atau mendapat predikat A (memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel). Hal tersebut menggambarkan bahwa capaian indikator tersebut telah mencapai target yang telah ditentukan sebesar 85,15 dengan persentase sebesar 101,50%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020, terjadi peningkatan sebesar 1,43% dan jika dibandingkan dengan capaian akhir Renstra 2024 telah tercapai dengan persentase sebesar 100,79%. Namun jika dibandingkan antar komponen perhitungannya, terdapat beberapa komponen yang mengalami kenaikan ataupun statis dan terdapat pula beberapa komponen yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Adapun rincian komponen perhitungannya adalah:

Tabel 10. Komponen Penilaian Implementasi SAKIP

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai	
			2020	2021
1.	Perencanaan Kinerja	30	25,74	28,13
2.	Pengukuran Kinerja	25	21,07	21,92
3.	Pelaporan Kinerja	15	13,27	13,27
4.	Evaluasi Internal	10	7,88	7,00
5.	Capaian Kinerja	20	7,26	16,11
Nilai Hasil Evaluasi		100	85,21	86,43
Predikat Penilaian			A	A

Rencana aksi untuk meningkatkan Nilai PM SAKIP pada tahun yang akan datang, yaitu:

1. Melakukan perbaikan pengelolaan kinerja dari sisi perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi;
2. Meningkatkan peran serta UPT Pusat dalam pengelolaan kinerja lingkup DJPT;
3. Melakukan pelaporan tepat waktu, dan melakukan reviu terhadap target maupun capaian yang tercapai ataupun tidak;
4. Penyelarasan data dan informasi terkait dengan target atau capaian pada aplikasi kinerjaju dengan Renstra ataupun Renja sehingga dapat memberikan informasi yang lebih valid; dan
5. Implementasi dari rencana aksi terhadap target-target yang tidak tercapai.

E. Nilai Rekonsiliasi Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Indikator tersebut merupakan kegiatan penilaian rekonsiliasi kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap terhadap Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Rekonsiliasi dimaksud dilakukan atas komponen-komponen kinerja sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen Nilai Rekonsiliasi terdiri dari kepatuhan, kesesuaian, ketercapaian, dan ketepatan. Pada tingkat Eselon II KKP, penilaian terhadap Nilai Rekonsiliasi dilakukan oleh Tim Pengelola Kinerja masing-masing Eselon II.

Tabel 11. Capaian IK “Nilai Rekonsiliasi Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap” Tahun 2021

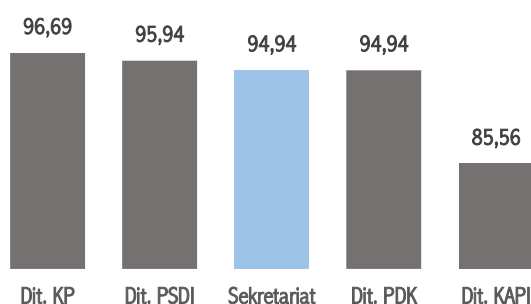
SK 2		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap								
IK 6		Nilai Rekonsiliasi Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)								
2020		2021			% Capaian		% Pertumbuhan	Renstra DJPT		
Realisasi		Target		Realisasi						
TW 1	Tahunan	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2024	% TW 1 2021	
-	90,64	85,15	-	-	-	-	-	85	-	
TW 2			TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2		TW 2	
-			-	-	-	-	-		-	-
TW 3			TW 3	TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3		TW 3	
-			-	-	-	-	-		-	-
TW 4			TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4		TW 4	
90,64			85,15	94,94	111,50	111,50	4,74		111,69	

Penilaian terhadap Nilai Rekonsiliasi oleh Tim Pengelola Kinerja DJPT diperoleh nilai 94,94 dari nilai maksimum 85,15 atau mendapat predikat A/memuaskan. Hal tersebut menggambarkan bahwa capaian indikator tersebut telah mencapai target yang telah ditentukan dengan persentase sebesar 111,50%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020, terjadi peningkatan sebesar 4,86% dan jika dibandingkan dengan capaian akhir Renstra 2024 telah tercapain dengan persentase sebesar 111,69%. Namun jika dibandingkan antar komponen perhitungannya, terdapat beberapa komponen yang mengalami kenaikan ataupun statis dan terdapat pula beberapa

komponen yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Adapun rincian komponen perhitungannya adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Komponen Penilaian Rekonsiliasi Kinerja

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
1.	Kepatuhan	25	25,
2.	Kesesuaian	25	25
3.	Ketercapaian	15	24,94
4.	Ketepatan	10	20
Nilai Hasil Evaluasi		100	94,94
Predikat Penilaian			A



Gambar 5. Grafik Perbandingan Capaian Nilai Rekonsiliasi antar Eselon II lingkup DJPT Tahun 2021

Berdasarkan gambar diatas, nilai capaian Sekretariat DJPT berada di peringkat 3 dengan capaian sebesar 94,94. Secara rinci pencapaian tertinggi berada pada Dit. KP sebesar 96,96 dan pencapaian terendah berada pada Dit. KAPI sebesar 85,56,77. Capaian Nilai Rekonsiliasi Kinerja diukur secara tahunan dan adapun kegiatan yang diseleggarakan oleh Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap untuk mencapai target tahunan ini antara lain:

1. Manajemen waktu terhadap penyampaian laporan kinerja tahunan kedalam aplikasi Esr MenPAN
2. Perbaikan pengelolaan kinerja dari sisi perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi;
3. Reviu terhadap target maupun capaian yang tercapai ataupun tidak; dan
4. Implementasi dari rencana aksi terhadap target-target yang tidak tercapai.

F. Persentase Pemenuhan Dokumen Maturitas SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terus ditingkatkan kematangannya (maturitasnya) secara menyeluruh dan terintegrasi untuk mencapai tujuan, yaitu memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan unit kerja, Penilaian tingkat maturitas SPIP ini mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 4/2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP.

Penilaian Indikator Nilai Maturitas SPIP DJPT terbagi dalam enam tingkatan, yaitu Level 0 (Belum Ada), Level 1 (Rintisan), Level 2 (Berkembang), Level 3 (Terdefinisi), Level 4 (Terkelola dan Terukur), dan Level 5 (Optimum). Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor 3860/SJ.2/KU.130/XII/2021 tentang Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020/2021 tanggal 6 Desember 2021, hasil penilaian mandiri

maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020/2021 yang dilakukan oleh Tim Asesor Kementerian Kelautan dan Perikanan telah dilakukan penjaminan kualitas oleh Inspektorat Jenderal dengan simpulan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level “terdefinisi” atau tingkat 3 dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar 3,874. Persentase capaian sebesar 100% yang mana telah dilakukan pemenuhan terhadap dokumen Maturitas SPIP DJPT. Pengukuran Indikator Kinerja Utama level maturitas penyelenggaraan SPIP pada Unit Eselon I menggunakan hasil akhir level maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian.

Tabel 13. Capaian IK “Persentase Pemenuhan Dokumen Maturitas SPIP Ditjen Perikanan Tangkap” Tahun 2021

SK 2		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap								
IK 7		Persentase Pemenuhan Dokumen Maturitas SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)								
2020		2021			% Capaian		% Pertumbuhan	Renstra DJPT		
Realisasi		Target		Realisasi				Target 2024	% TW 1 2021	
TW 1	Tahunan	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1			
-	100	100	-	-	-	-	-	100	-	
TW 2			TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2		TW 2	
-			-	-	-	-	-		-	-
TW 3			TW 3	TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3		TW 3	
-			-	-	-	-	-		-	-
TW 4			TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4		TW 4	
100			100	100	100	100	0		100	

Uraian lebih lanjut hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020/2021 adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020/2021 mencapai level “terdefinisi”

Seperti diuraikan sebelumnya, dengan tingkat maturitas “terdefinisi”, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan telah “mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif”. Sedangkan dari sisi manajemen risiko, menunjukkan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mencapai tingkat “defined” yaitu secara umum “memiliki strategi dan kebijakan terkait manajemen risiko serta telah dikomunikasikan, diimplementasikan dan manajemen organisasi juga telah menetapkan selera risiko”.

2. Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan

Penilaian atas komponen penetapan tujuan dilakukan terhadap 2 (dua) fokus penilaian sebagai berikut:

a. Kualitas Sasaran Strategis

Sasaran strategis kementerian telah berorientasi pada hasil, dapat menjawab mandat organisasi, dan mendukung pelaksanaan misi Presiden serta mendukung pencapaian Prioritas Nasional yang terdapat dalam RPJMN 2020-2024. Indikator kinerja sasaran strategis kementerian telah ditetapkan dengan jelas, spesifik, dapat diukur secara objektif. Target kinerja telah disusun dengan baik, realistis, memperhatikan capaian tahun- tahun sebelumnya, dan dievaluasi secara berkala

b. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis

Sasaran program telah selaras dan sinergi dengan sasaran strategis Kementerian. Sasaran program satuan kerja berorientasi pada hasil, dapat menjawab mandat organisasi, mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian, dan tidak tumpang tindih satu dengan lainnya. Indikator kinerja program telah ditetapkan dengan jelas, spesifik, dan dapat diukur secara objektif. Target kinerja program telah disusun dengan baik, realistis, memperhatikan capaian tahun-tahun sebelumnya, dan dievaluasi secara berkala

3. Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses

Penilaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap 5 (lima) unsur penilaian sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

- Penegakan integritas dan nilai etika telah dilaksanakan oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam organisasi;
- Standar kompetensi organisasi dan implementasi/pemanfaatannya telah dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya;
- Pimpinan organisasi terlibat dalam penyusunan dan penetapan kebijakan yang mendukung penciptaan lingkungan kerja yang kondusif untuk pencapaian tujuan organisasi serta memahami substansi kebijakan pengendalian intern dan mendorong penerapan kebijakan dalam berbagai interaksi kepada jajaran di bawahnya;
- Efisiensi dan efektivitas struktur organisasi dapat dilihat secara berkala melalui pengujian atas pelaksanaan proses bisnis organisasi dan ketepatannya dengan perencanaan strategis;
- Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab organisasi yang didelegasikan telah dapat dilihat melalui evaluasi berkala atas pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab serta analisis terhadap kualitas hasil pelaksanaan tugas/fungsi yang dilaksanakan (respon stakeholder);
- Kebijakan terkait pengelolaan SDM telah dikomunikasikan dan dipahami oleh pihak yang berkepentingan dalam organisasi dan terdapat upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko yang memadai. Namun, hanya sebagian kecil pegawai telah memiliki pemahaman terkait manajemen risiko;
- Praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam;
- Kementerian telah melaksanakan publikasi kebijakan kerjasama organisasi kepada para pihak yang berkepentingan (antara lain subjek, objek, dan penerima manfaat kerjasama) serta telah memiliki kebijakan pengelolaan risiko terkait kemitraan namun belum diterapkan dengan memadai.

b. Penilaian Risiko

- Kementerian telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko namun belum memadai dan kualitas identifikasi risiko dan register risiko belum memadai; dan
- Analisis risiko telah dilakukan terhadap risiko operasional unit kerja dan telah dapat menentukan prioritas risiko pada seluruh risiko operasional unit kerja. Selanjutnya, Kementerian telah menentukan rencana tindak pengendalian terhadap seluruh risiko operasional yang telah diprioritaskan. Namun tindak pengendalian terhadap seluruh risiko operasional unit kerja belum sepenuhnya diimplementasikan dan tindak pengendalian risiko belum sepenuhnya dapat menurunkan seluruh risiko operasional unit kerja dan risiko strategis unit kerja seperti yang diterapkan.

c. Kegiatan Pengendalian

- Pelaksanaan reviu kinerja telah mendukung pencapaian kinerja organisasi;

- Pembinaan SDM telah dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan organisasi;
- Perbaikan pengelolaan sistem informasi organisasi telah dilakukan secara berkelanjutan;
- Kebijakan pengelolaan atas aset organisasi termasuk pengamanan fisik atas aset diimplementasikan secara memadai;
- Perbaikan berkelanjutan atas penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja organisasi telah dilaksanakan;
- Pemisahan fungsi dalam proses transaksi dan kejadian telah dilaksanakan sesuai kebijakan/prosedur yang ditetapkan;
- Kebijakan dan implementasi terkait otorisasi atas transaksi dan kejadian telah dievaluasi sehingga dapat diketahui efektivitasnya;
- Pencatatan atas transaksi dan kejadian telah dilaksanakan sesuai kebijakan/prosedur yang ditetapkan;
- Terhadap sumber daya dan pencatatannya telah dilakukan pembatasan akses sesuai dengan ketentuan;
- Pertanggungjawaban terhadap sumber daya dan pencatatannya telah diperbaiki secara berkelanjutan dan secara optimal mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi;
- Pendokumentasian atas SPI serta transaksi dan kejadian penting telah dievaluasi sehingga dapat diketahui efektivitasnya.

d. Informasi dan Komunikasi

- Informasi yang relevan untuk mendukung pengendalian intern tersedia secara lengkap dan mudah untuk diperoleh serta sistem pengaduan telah diterapkan dan ditindaklanjuti sesuai Kebijakan/SOP. Selanjutnya, strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan pada sebagian pegawai pada tingkat operasional dan tingkat strategis unit kerja. Kemudian, register risiko dan rencana tindak pengendalian operasional telah dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait;
- Komunikasi yang efektif telah dilakukan kepada internal dan eksternal secara terstruktur, berkala dan telah dievaluasi.

e. Pemantauan

- Pemantauan pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan pada seluruh aktivitas pengendalian, namun hasil pemantauan belum dikelola;
- Evaluasi terpisah telah dilaksanakan pada seluruh aktivitas pengendalian, program dan kegiatan serta dilaksanakan oleh pihak yang kompeten dan dengan metodologi yang tepat, namun hasil evaluasi terpisah belum ditindaklanjuti seluruhnya.

4. Penilaian atas Komponen Pencapaian Tujuan

Penilaian atas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP dilakukan terhadap 4 (empat) fokus penilaian sebagai berikut:

a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi

- Penilaian capaian outcome telah menggunakan metode pengukuran dan pengumpulan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan ditelusuri sampai dokumen sumber yang dijabarkan dalam Laporan Kinerja sebagai bentuk akuntabilitas organisasi dengan menguraikan target kinerja, realisasi anggaran, prestasi dan penghargaan yang diraih;
- Penilaian capaian output telah menggunakan metode pengukuran dan pengumpulan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat ditelusuri sampai dokumen sumber yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan.

b. Keandalan Pelaporan Keuangan

Laporan Keuangan Kementerian mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun terakhir yaitu Laporan Keuangan TA 2018 dan Laporan Keuangan TA 2019, dan terdapat temuan berulang antara lain:

- Kuasa Pengguna Barang kurang optimal menatausahakan persediaannya;
- Pengguna barang belum sepenuhnya melakukan inventarisasi fisik persediaan terutama yang terkait persediaan aset biologis;
- Belum sepenuhnya memahami penyajian dan pengungkapan laporan keuangan khususnya Aset Tak Berwujud; dan
- Kuasa Pengguna Barang pada UAKPB terkait belum optimal melaksanakan fungsi pengendalian atas pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang menjadi tanggung jawabnya.

c. Pengamanan atas Aset Negara

- Terdapat kelemahan dalam pengamanan administrasi aset negara seperti tidak melaksanakan Sistem Penagihan Piutang Bukan Pajak PHP yang terintegrasi dan penatausahaan persediaan belum tertib;
- Terdapat kelemahan dalam pengamanan fisik aset negara seperti penyelesaian KDP pekerjaan percontohan instalasi budidaya laut lepas pantai (KJA Off Shore) masih berlarut-larut; dan
- Terdapat kelemahan dalam pengamanan hukum aset negara seperti kerjasama pemanfaatan BMN di Pulau Nipa belum sepenuhnya memberikan kontribusi profit sharing sesuai perjanjian.

d. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

- Terjadinya tindak pidana korupsi terkait Penetapan Izin Ekspor Benih Lobster (benur);
- Jumlah temuan ketidakpatuhan BPK melebihi 5 temuan dalam tahun anggaran terakhir.

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan ke tingkat terkelola dan terukur, tindak lanjut yang perlu ditingkatkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas indikator sasaran program yaitu dengan melakukan perbaikan Indikator Sasaran Program yang masih belum berorientasi hasil (outcome)
2. Meningkatkan kualitas struktur dan proses melalui pengambilan keputusan berdasarkan manajemen risiko dan meningkatkan kompetensi pegawai terkait manajemen risiko serta mengimplementasikan tindak pengendalian terhadap seluruh risiko operasional unit kerja dan risiko strategis unit kerja eselon I dan kementerian.
3. Meningkatkan kualitas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP agar hasil dan rekomendasi evaluasi tersebut dapat dijadikan dasar dalam peningkatan kualitas kinerja instansi secara berkelanjutan dan melakukan percepatan penyelesaian TLHP BPK dengan cara:
 - Menindaklanjuti rekomendasi BPK atas temuan (Kepatuhan dan SPI) yang disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaannya dan menyampaikan progres tindak lanjutnya disertai dengan bukti tindak lanjut yang relevan.
 - Menginventarisir permasalahan yang menghambat pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi BPK beserta langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut.
 - Meningkatkan pengendalian antara lain proses PBJ untuk mencegah timbulnya temuan serupa pada tahun berjalan dan tahun-tahun mendatang.
 - Membuat transparansi proses Pengadaan Barang/Jasa.
 - Memonitor aktivitas pengendalian risiko korupsi di KKP.

G. Persentase Unit Kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (persen)

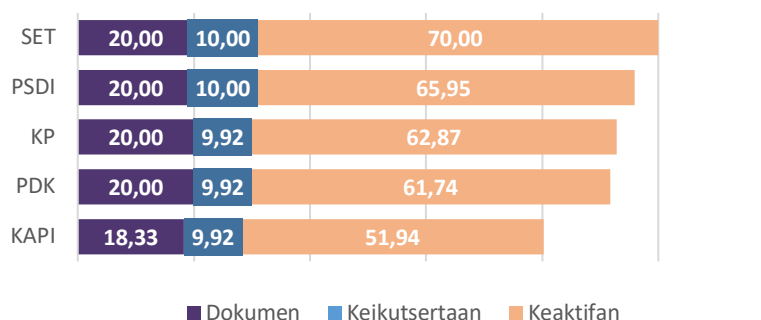
Sistem Manajemen Pengetahuan merupakan suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Perhitungan indikator ini berasal dari rata-rata persentase unit kerja level 1-2 yang tergabung dan mendistribusikan informasi dalam sistem informasi manajemen pengetahuan terpilih (aplikasi Bitrix24).

KKP melakukan upaya dalam hal pengelolaan SDM dan teknologi informasi untuk mendukung pencapaian Indikator dimaksud yaitu dengan menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan, dengan tujuan setiap pegawai memiliki akses untuk mendistribusikan dan menerima informasi, sehingga diharapkan setiap individu di lingkup KKP memiliki pemahaman yang sama atas informasi yang dibagikan. Pengukuran dilaksanakan melalui penghitungan jumlah Koordinator lingkup DJPT yang telah mengintegrasikan user manajemen pengetahuan dalam penggunaan aplikasi Bitrix24.

Tabel 14. Capaian IK “Persentase Unit Kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar” Tahun 2021

SK 2		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap								
IK 8		Persentase Unit Kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar								
2020		2021				% Capaian		% Pertumbuhan	Renstra DJPT	
Realisasi		Target		Realisasi						
TW 1	Tahunan	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2024	% TW 1 2021	
58,96	100,00	84,00	-	-	-	-	-	90	-	
TW 2			TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2		TW 2	
60,33			84,00	95,14	113,26	113,26	57,70		105,71	
TW 3			TW 3	TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3		TW 3	
75,00			84,00	95,03	113,13	113,13	26,71		105,59	
TW 4			TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4		TW 4	
100	84,00	97,57	116,15	116,15	-2,43	108,41				

Pada tabel terlihat bahwa realisasi Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar lingkup Sekretariat DJPT tahun 2021 sebesar 116,15%, hal ini menunjukkan bahwa capaiannya sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 84%. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, indikator ini mengalami penurunan sebesar 2,43%, namun perbandingan dengan tahun 2020 seharusnya tidak dapat dilakukan yang dikarenakan perhitungan pada tahun 2020 bukan rata-rata dari triwulan sebelumnya. Adapun nilai dari realisasi aspek keikutsertaan dan aspek keaktifan pada setiap Eselon II lingkup DJPT seperti gambar berikut:



Gambar 6. Capaian Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar lingkup Eselon II DJPT per Komponen Tahun 2021

Dari grafik menunjukkan bahwa seluruh dokumen pendukung Manajemen Pengetahuan telah seluruhnya terpenuhi. Nilai Manajemen Pengetahuan tertinggi pada Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap senilai 97,57%, dengan rata-rata nilai keikutsertaan 10%, ketersediaan dokumen 20% dan keaktifan 70,00%. Sedangkan nilai Manajemen Pengetahuan yang masih rendah yaitu pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dengan nilai 80,20%, hal ini disebabkan karena pada triwulan 1 belum dapat menyediakan laporan kinerja tepat waktu, terdapat pelaksana lingkup Direktorat KAPI belum tergabung dalam aplikasi Bitrix serta tingkat keaktifannya pada Direktorat KAPI hanya 51,94%. Untuk keberlanjutannya, upaya yang akan didorong untuk meningkatkan capaian IK antara lain: (1) melakukan evaluasi berkala pada semua level di unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap; dan (2) merekomendasikan untuk memberikan teguran tertulis bagi level di unit kerja yang tingkat keaktifannya belum optimal.

H. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Sekretariat DJPT yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (persen)

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sekretariat DJPT adalah Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat DJPT berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada triwulan 4 tahun 2020 s.d. triwulan 3 tahun 2021 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Sekretariat DJPT yang menjadi objek pengawasan. Cara penghitungannya dihitung dari jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Sekretariat DJPT dibagi dengan jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada Sekretariat DJPT.

Tabel 15. Capaian IK “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Sekretariat DJPT yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan” Tahun 2021

SK 2		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap					
IK 9		Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Sekretariat DJPT yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan					
2020		2021			% Capaian		% Pertumbuhan
Realisasi		Target		Realisasi			
TW 1	Tahunan	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1
-	60,00	65,00	-	-	-	-	-
TW 2			TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2	
30,00			65,00	90,07	138,57	138,57	200,23
TW 3			TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3	
45,00			65,00	68,95	106,08	106,08	53,22
TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4			
79,06			65,00	86,79	133,52	133,52	9,78

Realisasi persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada tahun 2021 mencapai 86,79 atau 133,52% dari target 65,00. Angka ini didapat dari perhitungan total temuan awal sebanyak 424 rekomendasi dan telah dilakukan tindak lanjut (tuntas) 368 rekomendasi sehingga sisa rekomendasi adalah sebesar 56 rekomendasi. Kedepannya perlu dilakukan langkah-langkah strategis agar semua rekomendasi yang disampaikan ditindaklanjuti secara tepat waktu, melalui:

- Peningkatan koordinasi dengan unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam rangka pemantauan untuk melengkapi tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan.
- Koordinasi intensif dengan Inspektorat Jenderal khususnya Inspektorat II sebagai mitra Ditjen Perikanan Tangkap untuk bersama-sama menindaklanjuti rekomendasi sampai selesai.

I. Jumlah Inovasi Pelayanan Publik (inovasi)

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung (PermenPAN & RB No.30/2014). Kriteria suatu inisiatif inovasi, yaitu:

1. Memberikan perbaikan pelayanan publik;
2. Memberikan manfaat bagi masyarakat;
3. Dapat dan/atau sudah direplikasi.(role model);
4. Berkelanjutan; dan
5. Inovasi sudah dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun.

Persentasi IK ini dihitung dari jumlah inovasi pelayanan publik yang diusulkan untuk diikuti sertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Target indikator jumlah inovasi pelayanan publik DJPT tahun 2021 adalah 1 inovasi dan diukur pada akhir tahun. Target IK ini pada tahun 2020 adalah 1 inovasi dan pada tahun 2021 telah tercapai 1 inovasi sebagaimana tabel berikut

Tabel 16. Capaian IK “Jumlah Inovasi Pelayanan Publik” Tahun 2021

SK 2		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap								
IK 10		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik								
2020		2021				% Capaian		% Pertumbuhan	Renstra DJPT	
Realisasi		Target		Realisasi						
TW 1	Tahunan	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2024	% TW 1 2021	
-			-	-	-	-	-		-	
TW 2			TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2		% TW 2 2021	
-			-	-	-	-	-		-	
TW 3	-	1	TW 3	TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3	3	% TW 3 2021	
-			-	-	-	-	-		-	
TW 4			TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4		% TW 4 2021	
-			1	1	100	100	-		100	

Inovasi yang diusulkan DJPT tahun 2021 dengan kategori Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup adalah Sistem Elektronik Log Book Penangkapan Ikan (SEILOP) untuk pendataan ikan dan kepatuhan nelayan yang lebih baik. Inovasi tersebut digagas dikarenakan pelaporan data hasil tangkapan ikan melalui log book penangkapan ikan (LBPI) merupakan kewajiban yang harus dipenuhi bagi kapal penangkap ikan yang beroperasi di perairan Indonesia. Kesulitan utama yang dihadapi nelayan dalam melaporkan LBPI yaitu kemampuan membaca dan menulis nelayan masih rendah, format isian dianggap rumit, serta form mudah robek karena berbahan kertas. Oleh karenanya, diperlukan inovasi SEILOP agar nelayan dapat dengan mudah menyampaikan data LBPI. Dengan menerapkan SEILOP, diperoleh data operasional penangkapan ikan di seluruh WPPNRI dengan kualitas dan kuantitas data yang lebih baik serta up to date. Informasi tersebut digunakan untuk mengendalikan kegiatan penangkapan termasuk alokasi perizinan yang dapat diberikan.

Inovasi ini berkontribusi langsung terhadap capaian Nasional SDGs/TPB tujuan nomor 14 yakni “mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan” dengan target nomor 4, “pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan merusak, serta melaksanakan rencana

pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya”; dan tujuan nomor 12 yakni “Memastikan pola konsumsi dan Produksi yang berkelanjutan” dengan target nomor 2 yakni “pada tahun 2030, mencapai manajemen berkelanjutan dan penggunaan yang efisien dari sumber daya alam”.

Melalui SEILOP, dapat diperoleh informasi kegiatan operasional penangkapan ikan yang meliputi koordinat penangkapan, waktu dan lama operasional penangkapan, serta jumlah dan jenis ikan yang ditangkap per setting. Dengan demikian, penerapan SEILOP sangat berperan dalam pemantauan tingkat pemanfaatan SDI dan hasilnya dapat membantu dalam pengambilan kebijakan pengelolaan SDI yang tepat guna dan juga dapat memantau tingkat kepatuhan kapal perikanan. Hal ini secara otomatis dapat membantu dalam menjaga kelestarian SDI dan sesuai dengan tujuan SDGs nomor 14 tersebut.

SEILOP didesain sangat sederhana sehingga nelayan dapat menginput data tanpa mengganggu kegiatannya dalam menangkap ikan. SEILOP didesain bekerja secara offline, sehingga nelayan dapat mengoperasikannya ketika di tengah laut. SEILOP memiliki potensi untuk direplikasi pada kapal perikanan berukuran < 5 GT yang mendaratkan hasil tangkapannya di sentra nelayan, termasuk pendataan hasil tangkapan di perairan umum daratan seperti danau, waduk, dan/atau sungai, yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam membangun dan mengimplementasikan SEILOP, sumber daya yang digunakan antara lain sumber daya keuangan, manusia, dan material. Strategi yang telah dilakukan agar inovasi tetap berlanjut antara lain meliputi strategi institusional, strategi sosial, dan strategi manajerial. Evaluasi SEILOP dilaksanakan secara internal institusi dan eksternal lembaga lainnya dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pemangku kepentingan yang terlibat dalam penerapan SEILOP meliputi eselon I lainnya, Akademisi, Komnas KAJISKAN, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Asosiasi Perikanan, LSM, dan nelayan/pelaku usaha. Faktor penentu keberhasilan inovasi ini yaitu implementasi SEILOP dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 11/PER-DJPT/2018 tentang Petunjuk Teknis Log Book Penangkapan Ikan, ketersediaan syahbandar di pelabuhan perikanan, serta kesadaran dari nelayan/pelaku usaha itu sendiri.

J. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)

Pengadaan barang/jasa (PBJ) merupakan bagian dari aktivitas pembangunan yang rutin dilaksanakan oleh instansi pemerintah setiap tahunnya. Kegiatan ini menjadi sangat strategis dan penting untuk dilakukan pengawasan karena seingkali bernilai besar, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi, dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menentukan kualitas Laporan Keuangan. Karenanya, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap perencanaan, prosedur dan aturan yang berlaku.

Dalam rangka mendorong pengawasan PBJ yang efektif, pada tahun 2021, Itjen menetapkan indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dengan target 72,5 sebagai suatu ukuran untuk menggambarkan kualitas kinerja kepatuhan pelaksanaan pengadaan barang/jasa lingkup DJPT dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku. Pengukuran dilaksanakan secara tahunan pada Triwulan IV berdasarkan jumlah nilai dari beberapa indikator berikut:

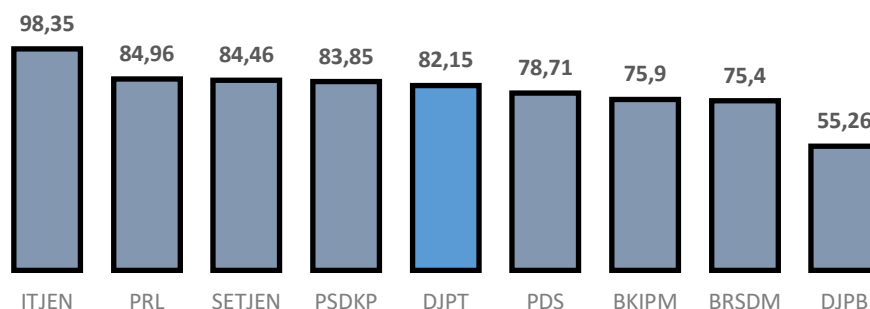
1. Ketersediaan Manajemen Risiko PBJ Strategis (10%)
2. Perencanaan dan Persiapan Pengadaan (15%)
3. Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang Dilaksanakan Melalui SPSE (10%)
4. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (45%)
5. Laporan Penyelenggaraan PBJ (5%)
6. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan PBJ TW I - III Tahun 2021 (15%)
7. Berdasarkan hasil pengukuran, diketahui bahwa Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap pada Tahun 2021 mencapai 82,15. Dengan demikian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2021 mencapai 113,31% atau diatas target yang ditetapkan.

Tabel 17. Capaian IK “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap” Tahun 2021

SK 2		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap							
IK 11		Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap							
2020		2021			% Capaian		% Pertumbuhan	Renstra DJPT	
Realisasi		Target		Realisasi					
TW 1	Tahunan	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2024	% TW 1 2021
-			-	-	-	-	-	80	-
TW 2			TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2		% TW 2 2021
-			-	-	-	-	-		-
TW 3	-	72,5	TW 3	TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3		% TW 3 2021
-			-	-	-	-	-		-
TW 4			TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4		% TW 4 2021
-			72,5	82,15	113,31	113,31	-		102,69

Hasil evaluasi yang disajikan pada tabel di atas menunjukkan bahwa Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup DJPT dapat melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 72,5. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian Tahun 2021 mencapai 102,69% dari target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 80%. Adapun uraian hasil pengukuran terhadap masing-masing indikator:

1. DJPT telah menyusun Manajemen Risiko PBJ Strategis;
2. KAK, HPS, spesifikasi teknis dan rancangan kontrak surat perjanjian untuk seluruh paket pengadaan telah tersedia paling lambat bulan juni tahun berjalan;
3. Seluruh pengadaan memiliki HPS yang dilengkapi dokumen pendukung;
4. Seluruh pemilihan penyedia barang/jasa untuk pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian dilaksanakan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
5. Seluruh BAST pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian memiliki volume sesuai dengan surat perjanjian dan/atau addendumnya; dan
6. Seluruh BAST pengadaan barang dengan kontrak berbentuk surat perjanjian memiliki spesifikasi sesuai dengan surat perjanjian dan/atau addendumnya.



Gambar 7. Perbandingan capaian Indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Eselon I KKP Tahun 2021

Berdasarkan gambar diatas, nilai capaian DJPT berada di peringkat 5 dengan capaian sebesar 82,15%. Secara rinci pencapaian tertinggi berada pada ITJEN sebesar 98,35% dan pencapaian terendah berada pada DJPB sebesar 55,26. Penyebab tidak optimalnya pencapaian IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup DJPT Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Belum terdapat data dukung atas aktivitas pengendalian Manajemen Risiko yang disusun;
2. Terdapat 636 dari 641 (99,22%) PBJ yang telah diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);
3. Terdapat paket PBJ dengan kontrak berbentuk surat perjanjian yang dikontrakkan pada bulan September 2021 yaitu Pengadaan Alat Penangkapan Ikan;
4. Terdapat 5 dari 60 (91,67%) pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian yang mengalami keterlambatan, yaitu rehab breakwater A-Jack di PPN Ambon; rehab breakwater di PPN Palabuhanratu, pembangunan mushola di PPN Tual, rehab gedung adminstrasi pelayanan publik di PPS Bitung, dan perbaikan bangunan gedung kantor permanen di PPS Cilacap;
5. Laporan penyelenggaraan PBJ disusun secara triwulanan, seharusnya bulanan.

K. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) lingkup Ditjen Perikanan Tangkap merupakan salah satu kegiatan strategis yang mendukung dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan BMN mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DJPT dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas laporan keuangan. Keterlibatan sumber daya yang besar dalam pengelolaan BMN seringkali diikuti dengan berbagai hambatan/ permasalahan, dan bahkan menjadi temuan berulang aparat pengawasan internal maupun eksternal. Pengawasan terhadap pengelolaan BMN diperlukan untuk memastikan kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.

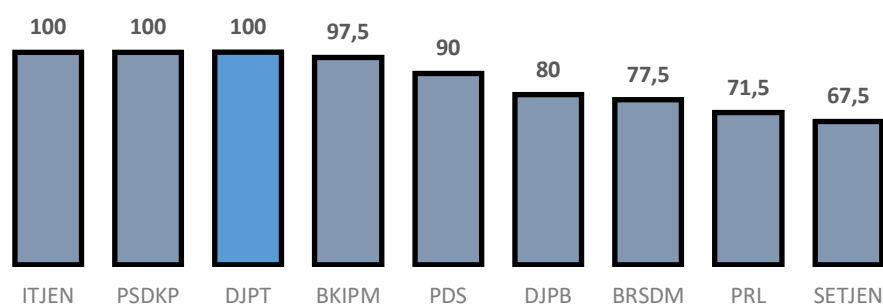
Dalam rangka mengukur pencapaian tujuan DJPT melalui kegiatan pengelolaan BMN, Inspektorat Jenderal (Itjen) KKP telah menetapkan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap seabadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2021. Hal ini ditujukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan DJPT patuh dan tertib dalam pengelolaan BMN. IKU tersebut merupakan suatu ukuran yang menggambarkan kepatuhan kinerja dalam melaksanakan pengelolaan BMN lingkup DJPT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2021, Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap ditargetkan mencapai 72,50 dan diukur secara tahunan pada Triwulan IV. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur sebagai berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2021 (12,5%).
2. Tersedianya usulan PSP BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan TW I 2021 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%).
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) periode Tahun 2017-2018 yang diselesaikan di Tahun 2020 (25%).
4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung BAST/Berita Acara Pemakaian (25%).
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (12,5%).

Tabel 18. Capaian IK “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap” Tahun 2021

SK 2		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap								
IK 11		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap								
2020		2021				% Capaian		% Pertumbuhan	Renstra DJPT	
Realisasi		Target		Realisasi						
TW 1	Tahunan	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2024	% TW 1 2021	
-			-	-	-	-	-	80	-	
TW 2			TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2		% TW 2 2021	
-			-	-	-	-	-		-	
TW 3	-	72,5	TW 3	TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3		% TW 3 2021	
-			-	-	-	-	-		-	
TW 4			TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4		% TW 4 2021	
-			72,5	100	137,93	137,93	-		125	

Hasil evaluasi yang disajikan pada tabel di atas menunjukkan bahwa Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap tercapai 100%, dapat dikatakan bahwa seluruh unsur pengukuran dapat terpenuhi dan memenuhi ketentuan serta melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 72,5. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian Tahun 2021 mencapai 125,00% dari target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 80%.



Gambar 8. Perbandingan capaian Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Eselon I KKP Tahun 2021

Berdasarkan gambar diatas, nilai capaian DJPT berada di peringkat 1 bersama dengan ITJEN dan PSDKP dengan capaian sebesar 100%. Secara rinci pencapaian tertinggi berada pada ITJEN, PSDKP dan DJPT sebesar 100% dan pencapaian terendah berada pada SETJEN sebesar 67,50%. Adapun uraian hasil pengukuran terhadap masing-masing indikator:

1. Dokumen Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) lingkup DJPT 2021 telah disusun;
2. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2021 lingkup Satker Pusat sebesar 87,46%, yaitu 279 paket Pemeliharaan pada RKBMN, telah dialokasikan anggaran Pemeliharaan dalam RKAKL untuk 319 NUP;

3. Usulan PSP BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan Triwulan I 2021 sebesar 100%, yaitu senilai Rp894.675.100,00;
4. tingkat penyelesaian perbaikan inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) periode Tahun 2017 - 2018 yang diselesaikan Tahun 2020 sebesar 100%, yaitu dari 130 objek telah disampaikan BAR IP/LHIP seluruhnya;
5. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2020 yang telah di dukung BAST/Berita Acara Pemakaian lingkup Satker Pusat sebesar 100%, yaitu dari 24 NUP telah didukung BAST/Berita Acara Pemakaian seluruhnya; dan
6. Laporan BMN Tahun 2020 dan Laporan BMN Semester I Tahun 2021 lingkup Eselon I telah disampaikan tepat waktu.

L. Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur. Guna mengetahui kinerja suatu program maka perlu dilakukan pengukuran. Pengukuran dan evaluasi kinerja yang selanjutnya disebut evaluasi kinerja adalah proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA-KL. Salah satu dasar hukum yang digunakan adalah PMK 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L.

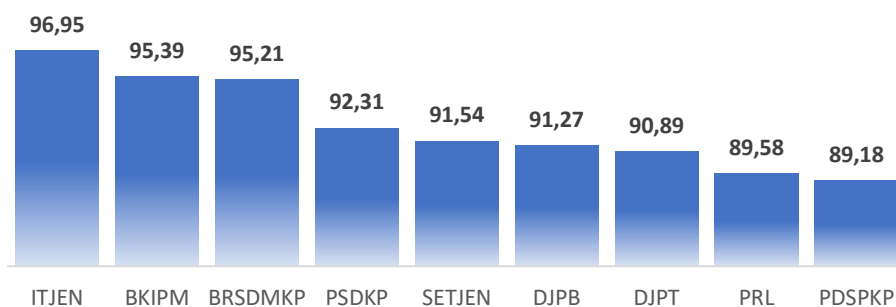
Tabel 19. Capaian IK "Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap" Tahun 2021

SK 2		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap								
IK 13		Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap								
2020		2021				% Capaian		% Pertumbuhan	Renstra DJPT	
Realisasi		Target		Realisasi						
TW 1	Tahunan	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2024	% TW 1 2021	
87,16	88,00	89,00	-	-	-	-	-	90	-	
TW 2			TW 2	TW 2	% TW 2	%	TW 2		% TW 2 2021	
88,81			80,00	77,47	96,84	87,04	-12,77		86,08	
TW 3			TW 3	TW 3	% TW 3	%	TW 3		% TW 3 2021	
96,72			80,00	77,47	96,84	87,04	-19,90		-	
TW 4			TW 4	TW 4	% TW 4	%	TW 4		% TW 4 2021	
92,61			89,00	90,89	102,12	102,12	-1,86		100,99	

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2021 masuk dalam kategori baik, yaitu sebesar 90,89. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran terhadap seluruh satker lingkup Ditjen Perikanan Tangkap perlu terus ditingkatkan. Orientasinya tidak lagi hanya berfokus kepada besarnya penyerapan anggaran tetapi juga pencapaian output anggaran melalui: (a) Kelancaran pelaksanaan anggaran (pembayaran/realisasi anggaran, penyampaian data kontrak, penyelesaian tagihan, SPM yang akurat, dan kebijakan dispensasi SPM); (b) Mendukung manajemen kas (pengelolaan UP/TUP, revisi DIPA, renkas/RPD, deviasi halaman III DIPA, retur SP2D); dan (c) Meningkatkan kualitas laporan keuangan (LKKL/LKPP) (penyampaian LPJ Bendahara dan penyelesaian pagu minus belanja).

Selanjutnya, satker lingkup Ditjen Perikanan Tangkap terus dikomunikasikan intensif untuk senantiasa tertib dan konsisten dalam penggunaan dan pengajuan pembayaran sesuai rencana anggaran yang telah ditetapkan di awal tahun. Upaya tersebut dapat mengubah pola pencairan anggaran sehingga lebih merata di tiap triwulannya dan penumpukan tagihan kepada kas negara di akhir tahun dapat berkurang. Hal ini diharapkan dapat menciptakan pelaksanaan anggaran yang

lebih berkualitas, tidak hanya serapannya tinggi, tetapi pencairannya pun lancar, efektif, dan efisien dengan capaian output yang benar-benar optimal.



Gambar 9. Perbandingan capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) antar Eselon I lingkup KKP Tahun 2021

Berdasarkan gambar diatas, rata-rata pencapaian indikator ini diatas target (89) atau tercapai diatas 100%. Secara rinci pencapaian tertinggi berada pada ITJEN sebesar 96,95 (108,93% terhadap target) dan pencapaian terendah berada pada DJPDSPKP sebesar 89,18 (100,20% terhadap target), sedangkan DJPT berada di peringkat 7 dengan capaian sebesar 90,89 (102,12% terhadap target). Namun untuk kedepannya terjadi perubahan perhitungan terkait indikator ini yang dikarenakan beberapa hal, yaitu:

1. Data IKPA yang tersedia pada aplikasi OM SPAN masih dalam validasi Biro Keuangan, hal ini berkaitan dengan jumlah satker yang ada pada IKPA sebanyak 438 satker, berdasarkan DIPA jumlah satker lingkup KKP Tahun 2021 sebanyak 398 dan terdapat beberapa satker yang nilai capaian IKPA dibawah rata-rata; dan
2. Terdapat reformulasi pembobotan pada beberapa indikator pada IKPA, salah satunya indikator capaian output, indikator tersebut memiliki bobot tertinggi dan sangat mempengaruhi capaian nilai IKPA satker, dimana sebagian besar capaian output dinilai dan tercapai pada akhir tahun.

M. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Nilai kinerja anggaran merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Adapun aspek yang dinilai adalah aspek implementasi yang terdiri atas 4 (empat) komponen yakni (1) Penyerapan Anggaran (P) dengan bobot 9,7 persen, (2) Konsistensi antara perencanaan dan implementasi (K) dengan bobot 18,2 persen, (3) Pencapaian keluaran (PK) dengan bobot 43,5 persen dan Efisiensi (E) dengan bobot 28,6 persen. Adapun pengelompokan hasil penilaian adalah sebagai berikut:

1. Nilai Kinerja Anggaran >90 persen sampai dengan 100 persen dikategorikan Sangat Baik;
2. Nilai Kinerja Anggaran >80 persen sampai dengan 90 persen dikategorikan Baik;
3. Nilai Kinerja Anggaran > 60 persen sampai dengan 80 persen dikategorikan Cukup atau Normal;
4. Nilai Kinerja Anggaran >50 persen sampai dengan 60 persen dikategorikan Kurang; dan
5. Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan 50 persen dikategorikan Sangat Kurang.

Pengukuran dan pelaporan indikator ini dilakukan setiap triwulan dengan mengacu kepada realisasi keempat komponen yang dicantumkan pada dashboard aplikasi SMART Kementerian Keuangan. Realisasi nilai kinerja anggaran Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2021 seperti pada table berikut.

Tabel 20. Capaian IK “Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap” Tahun 2021

SK 2		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap							
IK 14		Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap							
2020		2021			% Capaian		% Pertumbuhan	Renstra DJPT	
Realisasi		Target		Realisasi					
TW 1	Tahunan	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2024	% TW 1 2021
-	85,00	86,00	-	-	-	-	-	89	-
TW 2			TW 2	TW 2	% TW 2	%	TW 2		% TW 2 2021
-			-	-	-	-	-		-
TW 3			TW 3	TW 3	% TW 3	%	TW 3		% TW 3 2021
-			-	-	-	-	-		-
TW 4			TW 4	TW 4	% TW 4	%	TW 4		% TW 4 2021
86,24			86,00	87,98	102,30	102,30	2,02		98,85

Pengukuran dan pelaporan indikator ini dilakukan dengan mengacu kepada realisasi keempat komponen yang dicantumkan pada dashboard aplikasi SMART Kementerian Keuangan. Realisasi nilai kinerja anggaran Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2021 adalah sebesar 87,98% dengan kategori baik dari target 86,00 yang ditetapkan atau diatas target sebesar 102,30%.

Beberapa kendala dalam pengisian aplikasi SMART, yaitu:

1. Operator belum memahami cara pengisian sesuai Juknis pengisian aplikasi SMART;
2. Operator tidak mendapatkan data dalam pengisian capaian Realisasi Volume Keluaran;
3. Terdapat pengisian berulang sehingga terjadi akumulasi capaian;
4. Realisasi Indikator eluaran Kegiatan belum diinput hal ini mempengaruhi capaian Nilai Kinerja Satker dan DJPT;
5. Setiap tahun selalu ada pergantian operator yang tidak dilatih oleh operator sebelumnya; dan
6. Belum seluruh kegiatan telah dilaksanakan sehingga minim capaian output.

3.3. Kinerja Anggaran

Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap pada tahun 2021 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 128.868.554.000,- atau turun sebesar Rp. 49.789.330.000,- dari pagu alokasi anggaran tahun 2020 (turun 21,81%). Pagu alokasi anggaran tahun 2021 tersebut sebesar Rp. 47.001.011.240,- digunakan untuk belanja pegawai, Rp. 71.056.373.328,- untuk belanja barang dan Rp. 10.591.016.779,- untuk belanja modal. Realisasi anggaran pada tahun 2021 ini terealisasi sebesar Rp. 128.648.401.347,- atau mencapai 99,83%.

Tabel 21. Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	47.045.204.000	47.001.011.240	99,91
2.	Belanja Barang	71.148.787.000	71.056.373.328	99,87
3.	Belanja Modal	10.674.563.000	10.591.016.779	99,22

BAB 4. PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Setditjen Perikanan Tangkap tahun 2021 menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IK) selama tahun 2021. Terhadap capaian IK tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IK tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan.

Sampai dengan tahun 2021, pencapaian IK Sekretariat DJPT adalah sebesar 106,96%. Berdasarkan target pada rencana aksi Setditjen Perikanan Tangkap tahun 2021, keseluruhan IK dari total 14 IK pendukung sasaran strategis telah tercapai dan bernilai baik. Terhadap capaian IK tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IK tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan.

Dalam rangka peningkatan kinerja Sekretariat DJPT diharapkan pada tahun depan dapat dilakukan beberapa percepatan agar capaian IK dapat optimal, yaitu:

1. Lebih disiplin melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta memperhatikan efisiensi setiap pelaksanaan kegiatan
2. Percepatan penyelesaian kegiatan pendukung
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan untuk IK yang pencapaiannya pada akhir tahun, agar dapat direalisasikan pada awal selanjutnya.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Sekretariat DJPT tahun 2021 ini dapat menjadi menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja Sekretaris DJPT kepada Dirjen Perikanan Tangkap, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Awal



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON (021) 3519070 (EXT:1239), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAN: <https://kkp.go.id/djpt>, SURAT ELEKTRONIK: djpt@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Yuliadi**

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Muhammad Zaini**

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Januari 2021

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Perikanan
Tangkap

Muhammad Zaini

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan
Tangkap

Yuliadi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Sumber Daya Ikan Berkelanjutan	1	Tingkat validitas data produksi perikanan tangkap (persen)	85
2.	Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	2	Nilai PMPRB Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	31
		3	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	73
		4	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020 (persen)	100
		5	Nilai PM SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	85,15
		6	Persentase pemenuhan dokumen maturitas SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	100
		7	Persentase unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	84
		8	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	65
		9	Jumlah inovasi pelayanan publik (inovasi)	1
		10	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	72,5
		11	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	72,5
		12	Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	89
		13	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	86

Kegiatan : Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

Jumlah Anggaran Tahun 2021 : Rp. 154.966.328.000,-

Jakarta, 14 Januari 2021

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Perikanan
Tangkap



Muhammad Zaini

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan
Tangkap



Yuljadi

2. Perjanjian Kinerja Perubahan



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON (021) 3519070 (EXT:1239), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM: <https://kkp.go.id/djpt>, SURAT ELEKTRONIK: djpt@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Yuliadi**

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Muhammad Zaini**

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 4 Juni 2021

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Perikanan
Tangkap

Muhammad Zaini

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan
Tangkap

Yuliadi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

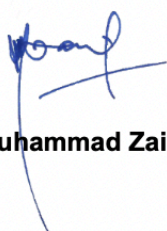
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Sumber Daya Ikan Berkelanjutan	1	Tingkat validitas data produksi perikanan tangkap (persen)	85
2.	Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	2	Nilai PMPRB Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	31
		3	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	73
		4	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020 (persen)	100
		5	Nilai PM SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	85,15
		6	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	85,15
		7	Persentase pemenuhan dokumen maturitas SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	100
		8	Persentase unit kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	84
		9	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Sekretariat DJPT yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (persen)	65
		10	Jumlah inovasi pelayanan publik (inovasi)	1
		11	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	72,5
		12	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	72,5
		13	Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	89
		14	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	86

Kegiatan : **Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen Perikanan Tangkap**

Jumlah Anggaran Tahun 2021 : **Rp. 139.698.723.000,-**

Jakarta, 4 Juni 2021

Pihak Kedua
 Plt. Direktur Jenderal Perikanan
 Tangkap


Muhammad Zaini

Pihak Pertama
 Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan
 Tangkap


Yuliadi

3. Perjanjian Kinerja Akhir



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON (021) 3519070 (EXT:1239), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM: <https://kkp.go.id/djpt>, SURAT ELEKTRONIK: djpt@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Trian Yunanda**

Jabatan : Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Muhammad Zaini**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 September 2021

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Muhammad Zaini

Pihak Pertama
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal
Perikanan Tangkap

Trian Yunanda

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP


NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Sumber Daya Ikan Berkelanjutan	1	Tingkat validitas data produksi perikanan tangkap (persen)	85
2.	Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	2	Nilai PMPRB Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	31
		3	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	73
		4	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020 (persen)	100
		5	Nilai PM SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	85,15
		6	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	85,15
		7	Persentase pemenuhan dokumen maturitas SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	100
		8	Persentase unit kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	84
		9	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Sekretariat DJPT yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (persen)	65
		10	Jumlah inovasi pelayanan publik (inovasi)	1
		11	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	72,5
		12	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	72,5
		13	Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	89
		14	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	86

Kegiatan : Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

Jumlah Anggaran Tahun 2021 : Rp. 128.868.554.000,-

Jakarta, 1 September 2021

Pihak Kedua
 Direktur Jenderal Perikanan Tangkap


Muhammad Zaini

Pihak Pertama
 Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap


Trian Yunanda